Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor ***Implementation of Progressive Tax Policies for Motorized Vehicles***

**Lidya Octafiani Br Sinulingga, Muhammad Husni Thamrin Nasution,
& Beby Masitho Batubara**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019

Abstrak

Kebijakan publik memiliki dua fungsi pokok yaitu budgetir dan regulasi. Sama halnya dengan Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang dimulai diberlakukan pada tahun 2012. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Upt Samsat Medan Selatan, yaitu: (1) Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. (2) Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. (3) Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, (4) Birokrasi dilaksanakan dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di Upt Samsat Medan Selatan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak Progresif dan Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

Public policy has two main functions: budget and regulation. Similarly, the Progressive Tax Policy of Motor Vehicles regulated in the Regional Regulation of North Sumatra Province No. 1 of 2011 which began in force in 2012. This researcher uses descriptive qualitative research method. The data collection procedure used by interview, observation, documentation. Data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the implementation of policies on the implementation of motor vehicle progressive taxes, including communication, human resources, executor attitude, and bureaucracy has been well implemented by Upt Samsat South Medan, namely: (1) Communication carried out externally by publishing a progressive tax to the public or taxpayer using print media and electronic media. (2) Human resources shall be carried out by preparing the personnel of the progressive tax service personnel of the vehicles in accordance with their respective fields of work and supported by adequate facilities and infrastructure of public services. (3) The executing attitude is carried out by Samsat employee by giving good service attitude to the taxpayers who pay the progressive tax in accordance with the operational standard of the established procedure; (4) Bureaucracy implemented implemented by simplifying the bureaucracy of vehicle tax payment service by forming working group, so taxpayers become easier in obtaining progressive tax service in Upt Samsat South Medan.

Keywords: Policy, Implementation, Progressive Tax and Motor Vehicle Tax

How to Cite: Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23

*Corresponding author:

ISSN 2085-0328 (Print)

E-mail: : devita.rani12@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Perkembangan kendaraan bermotor ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menarik pajak kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor tersebut, demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang sangat berpengaruh kepada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Medan.

Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya (Zulkarnaen, 2011).

Kenyataannya, sebagian besar warga di kota Medan belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan sedikit permasalahan pada saat warga membayar kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu (Nasution & Sinaga, 2014).

Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Pajak progresif dari Fungsi *Budgetir* (Finansial) adalah memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari fungsi *Regulasi* (Mengatur) pajak progresif digunakan sebagai alat

untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah menekan jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap "penguasaan" yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono (2006), Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015). Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan/sedang diteliti. Observasi, menurut Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi Wawancara: 1) Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala UPT Samsat Medan Selatan; Informan Utama, yaitu: 1) Petugas Pemungutan Pajak Progresif; 2) Informan Tambahan, yaitu wajib pajak (masyarakat)

Dokumentasi, menurut Sugiyono (2014) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Miles dan Huberman (2014) analisis data meliputi: Pengumpulan Data yang merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Reduksi data merupakan proses

berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih jelas terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Triangulasi, Berarti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan menurut indikator Edward III dengan metode komunikasi para implementator dan masyarakat hanya sebagian yang mengetahui informasi tentang berlakunya pajak progresif dari Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala UPT Samsat Medan Selatan pada tanggal 9 februari 2018, dengan pertanyaan Apa itu pajak progresif Mengapa ada pajak progresif Bagaimana latar belakangnya: "Pajak progresif adalah pajak kendaraan yang dimiliki lebih dari 1 (satu). Mengapa ada. Ya, karena kendaraannya yang terlalu banyak. Latar belakangnya itu karena kendaraannya lebih dari 1 ntah itu kendaraannya ada 2, 3, 4, bahkan sampai 5".

Sementara itu dengan pertanyaan tentang informasi sejak kapan kebijakan pajak progresif di terbitkan Ibu Ita Savitri, SE selaku Kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan: "Kebijakan itu diterbitkan oleh Peraturan Perda no 1 Tahun 2011 yang di terbitkan pada Bulan April Tahun 2011". (pada tanggal 9 februari 2018).

Dalam melalui informasi apakah masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak progresif Ibu Ita Savitri, SE sebagai kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan bahwa: "Menurut saya masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak

progresif itu melalui iklan dan spanduk yang telah di paparkan"

Sementara itu Ibu Suharningsih berpendapat sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif di Samsat Medan Selatan dengan pertanyaan, dari manakah Ibu mengetahui informasi tentang berlakunya pajak progresif? "Saya mengetahuinya ketika saya mau membayar pajak kendaraan saya"

Hal ini yang telah disampaikan Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan tentang kualitas SDM pegawai yang bertugas secara khusus mengenai pajak progresif dalam wawancara yaitu: "Kualitas SDM nya baik, mereka juga lebih mengerti karena ada bagian IPTEK dan pajak progresif itu bagiannya di ruang tersendiri".

Berbanding dengan pendapat sebelumnya tentang kualitas SDM pegawai yang bertugas mengenai pajak progresif, Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif mengatakan bahwa: "Menurut Ibu mereka mengerjakan tugasnya sudah baik tanpa ada embebani masyarakat sedikit pun"

Dalam mengenai pajak progresif tanggapan pegawai dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi, menyatakan bahwa: "Sebenarnya pro dan kontra pegawai dan masyarakat sebenarnya keberatan, tetapi karena masyarakat tersebut memiliki kendaraan lebih dari satu. Ya peraturan yang seperti itu ditetapkan juga awalnya sebenarnya itu dari pusat dari Permendagri diturunkan menjadi Perbut diubah mejadi Perda aslinya itu dari Pusat untuk dalam negeri".

Dalam hal tersebut tanggapan sebagai masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diterapkan Ibu Suharningsih selaku masyarakat atau wajib pajak yang terkena pajak progresif mengatakan yaitu: "Pastinya saya keberatan karena saya harus membayar lebih besar ketika saya harus membayar pajak kendaraan saya".

Mencakup sikap pelaksana para pegawai sudah melaksanakan tugasnya dengan efektif tanpa ada paksaan atau keberatan dalam melayani masyarakat. Dalam hal uraian kerja dari pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Ibu Ita Savitri, SE sebagai Kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan: "Pajak progresif itu bagian dari pajak kendaraan bernotor. Ketika masyarakat membayar pajak

dan dia terkena pajak progresif dia harus membayar sekaligus”

Sama halnya yang sebelumnya tentang sikap pelaksanaan pegawai di samsat medan selatan dalam melayani masyarakat, Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif mengatakan: “Sikap mereka dalam melayani masyarakat itu baik tidak ada tanpa paksaan”. Mengenai mekanisme kebijakan pajak progresif apakah sudah berjalan secara efektif dan Ibu Ita Savitri, SE selaku Kepala Upt Samsat Medan Selatan menyatakan: “Sudah efektif”

Dalam hal tersebut berkaitan dengan bagian/struktur yang melaksanakan kebijakan pajak progresif tersebut, Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan yaitu: “Strukturnya tidak ada, karena pajak progresif ini adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor”.

Hal ini sumber hukum/perda dari kebijakan pajak progresif tersebut, Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan menyatakan bahwa: “Sumbernya dari Perda No 1 Tahun 2011”.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut selalu ada faktor-faktor yang menghambat berjalannya kebijakan pajak progresif tersebut. Hal ini menurut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi menanggapi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menyatakan bahwa: “Kalau hambatannya sebenarnya tidak ada cuman masyarakatnya masih banyak yang belum tahu artinya gini dia memang tidak tahu kendaraan lebih dari 1 itu dikenakan progresif. Solusinya adalah kalau memang kendaraan ternyata kendaraannya tinggal 1 yang terdata di samsat ini kendaraannya ada 5. Ternyata kendaraannya tinggal 1 yang lainnya sudah dijual mereka lapor biar kendarannya yang 4 itu kita blokir. Jadi dia tidak kena pajak progresif dan 4 kendaraan itu harus di BBNkan”.

Dalam membahas faktor penghambat ada juga faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Darwin Zufri Lumban Batu sebagai kepala Administrasi menyatakan bahwa: “Faktor pendukungnya tidak ada, hanya dasar hukum ini saja Perda No 1 Tahun 2011. Dan sekarang Perda No 1 Tahun 2011

ini sudah diubah menjadi Perda No 1 Tahun 2015 tetapi yang diubah itu hanya tarif pajak progresif untuk roda empat. Jadi, kalau Perda No 1 Tahun 2011 semua tarif itu sama artinya 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih itu dia dibedakan kelasnya tetapi sama. Progresif yang tariff normal itu 1,75% yang kedua. Kalau menurut Perda No 1 Tahun 2011 itu 2%, yang ketiga 2,5%, yang keempat 3%, yang kelima samapai seterusnya 3,5%. Tetapi kalau di Perda No 1 Tahun 2015 yang khusus untuk mobil diubah. Jadi progresif untuk mobil 2,5%, yang ketiga 3%, yang keempat 3,5%, dan yang kelima sampai seterusnya itu 4,5%”.

Jika hal ini membicarakan solusi menurut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu sebagai kepala Adiministrasi dalam cara menangani keluhan atau bebab masyarakat yang terkena pajak progresif menyatakan bahwa: “Kita menyediakan ruangan khusus untuk mereka yang mau complain. Misalnya kendaraan yang sudah di jual agar segera nama kendaraannya di blokir.”

Berbanding terbalik dengan pendapat informan sebelumnya, menurut Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif berpendapat tentang merasa terbebani dengan prosedur dan tata cara pembayaran pajak progresif yang telah ditentukan menyatakan bahwa: “Sebenarnya saya terbebani. Karena saya mempunyai kendaraan lebih dari 1”

Jika membahas tentang pendapat masyarakat tentang mau atau tidak mau masyarakat tersebut membalik namakan atas kendaraannya agar tidak terkena pajak progresif. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Suharningsih sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif berpendapat bahwa: “Saya malas mbak, karna untuk membalik namakan kendaraan yang saya miliki harus menunggu lama lagi, lalu membutuhkan biaya yang besar mbak. Malah nanti lebih besar lagi biaya baliknama daripada pajak yang saya bayar tiap tahun walaupun terkena pajak progresif”.

SIMPULAN

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DP2KB Kota Medan dalam pengendalian jumlah penduduk kota Medan melibatkan peran aktif masyarakat serta melakukan

kerjasama yang baik, baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Medan terdiri atas hambatan Intern yakni hambatan yang berasal dari dalam DP2KB Kota Medan dan hambatan ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar DP2KB Kota Medan yakni masyarakat. Hambatan yang berasal dari DP2KB itu sendiri yakni kurangnya tenaga teknis dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat meliputi pernikahan usia dini di masyarakat, kurangnya pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat dan tingginya angka kelahiran.

Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana. Namun pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mau berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana walaupun masyarakat sudah mengetahui adanya kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwipurna, M.W.F. (2015). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Fajariani. (2012). Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims". Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- <http://defenisi/pengertian-progresif/> diakses pada tanggal 25-07-2017
- <http://organisasi.org/jenis-macam-sistem-pemungutan-pajak-proporsional-progresif-regresif-dan-degresif-ilmu-pengetahuan-perpajakan> diakses pada tanggal 08-08-2007; 15:32

- <http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor.html> diakses pada tanggal 30-05-2017
- <http://www.repository.usu.ac.id/handle/123456789/59752>
- Madiasmu. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moenir, H.A.S, (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, F.R. dan Sinaga, R.S. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 1-17.
- Nugraha, H.A. (2012). Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota). Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Siahaan, M.P. (2004). Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, E. (2011). Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahad, S.A. (2014). Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkarnaen, T.R., (2011), Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2): 209-231.